**LAPORAN RENCANA AKSI NASIONAL OPEN GOVERNMENT INDONESIA**

**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

**“Perluasan Akses dan Kapasitas Layanan Bantuan Hukum”**

**Sasaran Keberhasilan : Perluasan Akses dan Kapasitas Layanan Bantuan Hukum**

**Ukuran Keberhasilan : Terimplementasinya Standar Layanan Bantuan Hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum**

**B12 (2021) : Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait Standar Layanan Bantuan Hukum dan Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum**

Bantuan Hukum bagi orang miskin sangat penting artinya dalam konteks membuka akses terhadap keadilan. Jumlah advokat di Indonesia dan sebarannya tidak merata di tiap daerah. Faktanya, banyak daerah kabupaten/kota yang tak memiliki jumlah advokat memadai. Mengacu pada data jumlah advokat yang terlibat dalam pemberian Bantuan Hukum yang terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) cq. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), sampai dengan Tahun 2021 telah terjaring sebanyak 524 PBH terakreditasi yang di dalamnya terdapat 4.300 Advokat.

Jumlah 524 PBH tersebut belum merata disetiap Kabupaten/Kota, melainkan baru tersebar di 215 Kabupaten/Kota, artinya baru 42% Kabupaten/Kota yang memiliki PBH dari total 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia). Sementara, populasi orang miskin dan tidak mampu serta tingginya kebutuhan bantuan hukum tidak terbatas di daerah perkotaan saja. Banyak dari mereka yang butuh layanan bantuan hukum berlokasi di pedesaan.

Selain tidak merata persebarannya, kewajiban advokat memberikan bantuan hukum pro bono belum dijalankan sepenuhnya. Tidak ada mekanisme yang dapat memastikan bahwa setiap advokat sudah menjalankan kewajiban pro bono yang diamanatkan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Itu sebabnya, negara hadir melalui pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Puluhan miliaran dana bantuan hukum disediakan lewat APBN, yang disalurkan melalui organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH).

PBH yang mendapatkan dana bantuan hukum harus menjalankan prinsip akuntabilitas, karena dana yang digunakan adalah dana negara. Advokat dan paralegal yang membantu memberikan bantuan hukum harus bersunggung-sungguh menjalankan tugas mulia membantu orang miskin. Kesungguhan dan komitmen membantu orang miskin itu pula yang dipegang sejumlah pengelola PBH yang mendapatkan akreditasi terbaik selama ini.

Maka dalam rangka menjamin kualitas layanan Bantuan Hukum diterbitkanlah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Permenkumham 4/2021).

Permenkumham 4/2021 ini memuat Standar Layanan Bantuan Hukum yang meliputi :

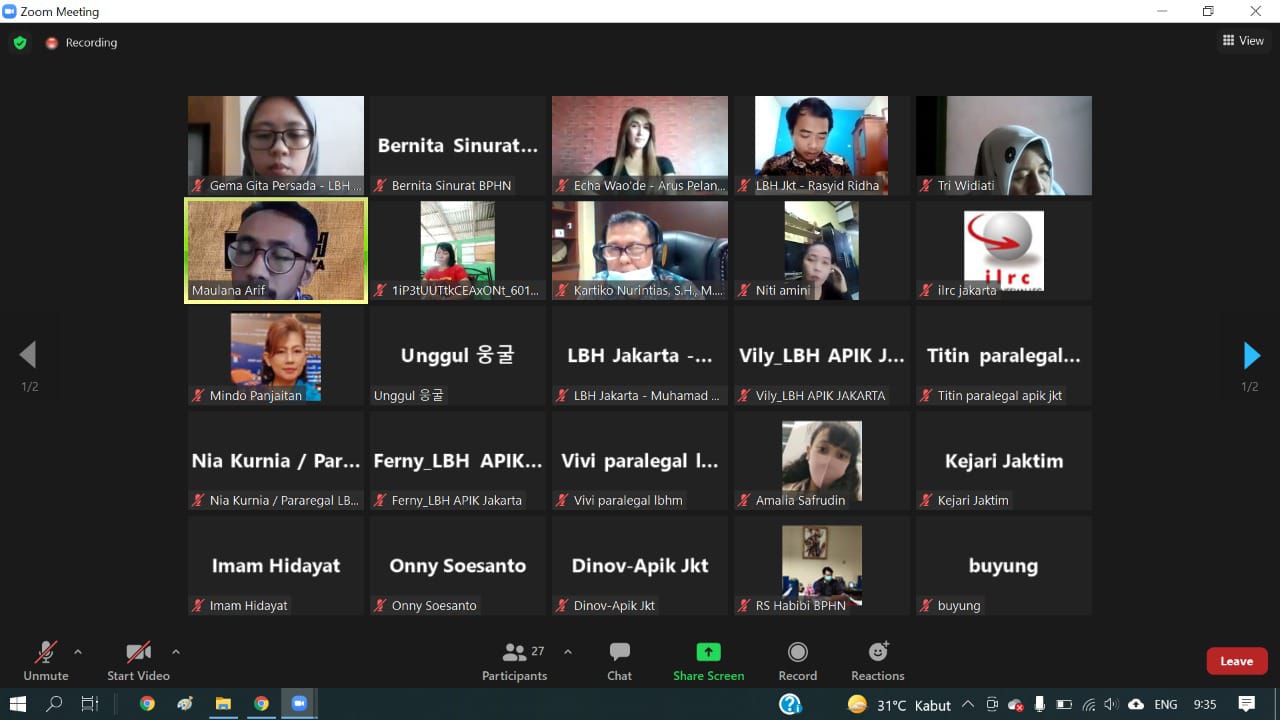
1. Standar Layanan Bantuan Hukum Litigasi; dan
2. Standar Layanan Bantuan Hukum Nonlitigasi.

Selain itu, amanat peraturan delegasi Permenkumham 4/2021 yaitu perlu adanya Pedoman tentang Standar Layanan Bantuan Hukum yang memuat :

1. Standar Layanan Bantuan Hukum Litigasi;
2. Standar Layanan Bantuan Hukum Nonlitigasi; dan
3. Pembinaan, yang meliputi:
4. Asistensi;
5. Penilaian;
6. Pengaduan; dan
7. Sanksi.

Berkaitan dengan penyerbarluasan informasi terhadap Permenkumham 4/2021, BPHN telah melakukan beberapa kali sosialisasi kepada PBH via platform Zoom. Adapun data dukung kegiatan sebagaimana dimaksud yaitu sebagaimana terlampir.

**LAMPIRAN DATA DUKUNG**

****

1. **Yayasan Hukum Lasinrang**

1. **LBH Surya NTT**

****

1. BKBH FH Universitas Jember

